

**PENERAPAN APLIKASI PELAYANAN PERIZINAN *ONLINE*
DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PEMALANG**

Oleh :

Anangga Widuta (14010114120006)

Departemen Politik dan Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro
Jl. Prof. H. Soedarto, SH., Tembalang, Semarang

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelayanan perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang dengan menggunakan *Electronic Government*. Pelayanan perizinan menggunakan *Electronic Government* di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang merupakan dinas yang mempelopori adanya *Electronic Government* di Kabupaten Pemalang.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan metode pendekatan kuantitatif. Teknik pengambilan sampel menggunakan *Non Probability Sampling* dengan menggunakan data hasil dari kuesioner, dimana tidak semua unit populasi memiliki kesempatan untuk dijadikan sampel penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa akses pelayanan perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang adalah baik. Dengan indikator Ketergunaan website tentang *Electronic Government* mendapatkan nilai 373 dengan kategori baik, sistem navigasi website mendapatkan nilai 400 dengan kategori baik, desain visual mendapatkan nilai 415 dengan kategori baik, respon dinas mendapatkan nilai 390 dengan kategori baik, konten website mendapatkan nilai 390 dengan kategori baik, konten webiste mendapatkan nilai 412 dengan kategori baik, dan aksesibilitas mendapatkan nilai 424 dengan kategori sangat baik.

Dari hasil tersebut juga mendapatkan temuan baru dalam akses pelayanan perizinan menggunakan *Electronic Government* di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang bahwa masih banyak masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan perizinan masih belum mengetahui mengenai *Electronic Government*. Masyarakat yang belum mengetahui hal ini masih mendatangi langsung ke kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan mengurus perizinan secara manual yang prosesnya membutuhkan waktu yang lebih lama dikarenakan input informasi dilakukan oleh petugas pelayanan yang terbatas.

Kata Kunci : *Electronic Government*, Pelayanan Perizinan

The Ease Of Application Of Online Licensing Services In The Investment Service And Integrated Services Of One Door Of Pemalang District

ABSTRACT

This study aims to determine the licensing service in the Pemalang District Investment and One-Stop Service Department by using Electronic Government. Licensing services using Electronic Government in the One-Stop Integrated Investment and Services Office of Pemalang Regency are agencies that pioneered the existence of Electronic Government in Pemalang District.

This research uses descriptive research with quantitative approach method. The sampling technique uses Non Probability Sampling using the results data from the questionnaire, where not all population units have the opportunity to be used as research samples.

The results showed that access to licensing services in the Investment Office and the One Stop Services of Pemalang Regency was good. With indicators the use of websites on Electronic Government gets 373 in good category, website navigation system gets 400 in good category, visual design gets 415 in good category, service response gets 390 in good category, website content gets 390 in good category, website content gets 412 with good category, and accessibility gets 424 with very good category.

From these results also get new findings in accessing licensing services using Electronic Government in the Investment and One-Stop Service Department of Pemalang District that there are still many people who want to get licensing services still do not know about Electronic Government. The people who do not know this are still going directly to the Investment Office and One-Stop Services office and manage the permits manually, the process takes longer because the information input is done by limited service personnel.

Keywords : Electronic Government, Licensing Services

PENDAHULUAN

Pelayanan yang baik merupakan kewajiban bagi pemerintah merupakan hal yang wajib dilaksanakan untuk memudahkan masyarakat mengakses kedalam tatanan pemerintah untuk menunjang kehidupan. Pelayanan adalah produk-produk yang tidak kasat mata (tidak dapat diraba) yang melibatkan usaha-usaha manusia dan menggunakan peralatan (Ivancevich, Lorenzi, Skinner dan Crosby 1997:448) (dalam Ratminto dan Winarsih 2016:2).

Kebijakan penerapan *Electronic Government (e-Government)* merupakan suatu upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik. Perkembangan dan pemanfaatan teknologi informasi (TI), diiringi semakin meluasnya penggunaan internet sebagai akses ke dunia maya, telah mendorong suatu perubahan yang revolusioner. Perubahan pemanfaatan teknologi informasi tersebut selain dalam cara berkomunikasi dan menikmati hiburan, juga dalam pemerintahan. Pemerintah dituntut untuk memeberikan informasi-informasi yang sudah tertuang dalam Undang-undang No. 14 tahun 2008 guna menciptakan salah satu asas penyelenggaraan pemerintah yang baik yaitu asas keterbukaan dengan asas keterbukaan ini maka juga akan timbul mengikuti asas yang lain misalnya asas kepercayaan. Karena pemerintah terbuka dalam penyelenggaraan dan siap sedia untuk memberikan informasi publik yaitu APBD, program-program pemerintah, realisasi program, informasi tentang wilayah dan semua yang bersifat publik.

Di Kabupaten Pematang Jaya *Electronic Government* masih terbilang baru. Semua dinas yang ada di Kabupaten Pematang Jaya sudah mulai menggunakan internet untuk menunjang akses kemudahan dalam melayani masyarakat. Hal ini menjadi suatu transisi dalam pemerintahan khususnya di Kabupaten Pematang Jaya untuk beradaptasi dengan sistem baru ini.

Peran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang berada di Kabupaten Pematang Jaya sebagai pelayan publik diharapkan dapat berjalan maksimal mengingat peran yang dilaksanakan merupakan peran vital bagi pelaksanaan pelayanan publik yang baik. Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk mengangkat judul dalam penelitian ini yaitu : penerapan *electronic government* melalui website dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu untuk kemudahan akses informasi perizinan masyarakat Kabupaten Pematang Jaya.

KERANGKA TEORI

Good Governance

Semangat reformasi politik di Indonesia beberapa tahun lalu telah memunculkan terminologi baru yang disebut sebagai *Good Governance*. Popularitas terminologi ini mencuat di kalangan pemerintah, akademis, dan lembaga swadaya masyarakat. Terminologi *Good Governance* sering diterjemahkan sebagai tata pemerintahan, penyelenggara negara, atau cukup diartikan dengan penyelenggaraan ataupun pengelolaan (*manajemen*).

Secara teoritis, *good governance* sendiri dapat diberi arti sebagai suatu proses yang mengorientasikan pemerintahan pada distribusi kekuatan dan kewenangan yang merata dalam seluruh elemen masyarakat untuk dapat mempengaruhi keputusan dan kebijakan yang berkaitan dengan kehidupan publik beserta seluruh upaya pembangunan politik, ekonomi, sosial dan budaya mereka dalam sistem pemerintahan.

Pelayanan Publik dengan Menggunakan Electronic Government

Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan pendudu atas barang, jasa, dan atau pelayanan adminitratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik

Pelayanan publik sudah menjadi keharusan bagi negara untuk menjalankannya gunan melayani warga negaranya. Negara dituntut terlibat dalam memproduksi barang dan jasa yang

diperlukan oleh rakyatnya (*public goods and services*) baik secara langsung maupun tidak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Negara tentunya dalam melaksanakan fungsi tersebut memiliki perangkat yang disebut pemerintah dan pemerintahannya. Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 juga dijelaskan bahwa penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.

Electronic Government

Electronic Government atau biasa disebut *e-government* memiliki banyak deskripsi dari berbagai kalangan. The World Bank Group mendefinisikan *e-government* sebagai : “*the use by government agencies of information technologies (such as Wide Area Network), the internet, and mobile computing) that have the ability to transform relations with citizens, business, and other arms of government.*” (Penggunaan teknologi informasi oleh agensi pemerintah (seperti penggunaan WAN, internet, dan komputer mobile) yang mana memiliki kemampuan untuk merubah hubungan dengan warga negara, bisnis, dan cabang lain dari pemerintah.)

Sedangkan menurut Clay. G Wescott (Pejabat Senior Asian Development Bank) *e-government* “*the use of information and communication technology (ICT) to inform cost-effective and efficient government government, facilitate government services more convenient, allowing grater public access to nformation and make government more responsible to the citizens.*” (penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (ICT) untuk mempromosikan pemerintahan yang lebih efisien dan penekanan biaya yang efektif, kemudahan fasilitas layanan pemerintah serta memberikan akses informasi terhadap masyarakat umum, dan membuat pemerintahan lebih bertanggung jawab kepada masyarakat.)

Efektivitas dan Efisiensi

Efektivitas berasal dari kata efektif yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti “dapat membawa hasil; berhasil guna”. Sehingga mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yangtelah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai.

Richard M. Steers menyatakan efektivitas adalah tujuan yang bergabung kepada seberapa berhasilnya suatu organisasi untuk mencapai sasaran keinginannya.

Selanjutnya Steers mengemukakan bahwa pada dasarnya cara yang terbaik untuk meneliti efektivitas ialah dengan memperhatikan secara serempak tiga buah konsep yang saling berhubungan yaitu

1. Paham mengenai optimasi tujuan : efektivitas dinilai menurut ukuran seberapa jauh organisasi berhasil mencapai tujuan yang layak dicapai;
2. Perspektif sistematika : tujuan mengikuti suatu daur dalam organisasi;
3. Tekanan pada segi perilaku anusia dalam susunan organisasi : bagaimana tingkah laku individu dan kelompok akhirnya dapat menyokong atau menghalangi tercapainya tujuan organisasi.

Sedangkan Efisiensi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berbarti “ketepatan cara (usaha, kerja) dalam menjalankan sesuatu (dengan tidak membuang waktu, tenaga, biaya); kedayagunaan; ketepatgunaan”. Sehubungan dengan hal-hal yang dikemukakan diatas, maka secara singkat efektivitas dan efisiensi adalah efektivitas berarti melakukan atau mengerjakan sesuatu tepat pada sasaran, sedangkan efisiensi berarti melakukan atau mengerjakan sesuatu secara benar.

Website

Website atau situs juga dapat diartikan sebagai kumpulan halaman yang menampilkan informasi data teks, data gambar diam atau gerak, data animasi, suara, video dan atau gabungan dari semuanya, baik yang bersifat statis maupun dinamis yang membentuk satu rangkaian bangunan yang saling terkait dimana masing-masing dihubungkan dengan jaringan-jaringan halaman (hyperlink). Bersifat statis apabila isi informasi website tetap, jarang berubah, dan isi informasinya searah hanya dari pemilik website. Bersifat dinamis apabila isi informasi website selalu berubah-ubah, dan isi informasinya interaktif dua arah berasal dari pemilik serta pengguna website. Contoh website statis adalah berisi profil perusahaan, sedangkan website dinamis adalah seperti Friendster, Multiply, dll. Dalam sisi pengembangannya, website statis hanya bisa diupdate oleh pemiliknya saja, sedangkan website dinamis bisa diupdate oleh pengguna maupun pemilik.

METODOLOGI

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik *non-probability sampling*. Penelitian dilakukan dengan membagikan 100 kuesioner kepada masyarakat yang menggunakan pelayanan Electronic Government di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pematang Jaya.

PEMBAHASAN

Identitas Responden

Data Responden berdasarkan jenis kelamin

No	Jenis Kelamin	Frekuensi	Presentase (%)
1	Laki-laki	64	64
2	Perempuan	36	36
Jumlah		100	100 %

Sumber : Data primer yang diolah, Tahun 2018

Berdasarkan pada tabel 3.1 diatas menunjukkan bahwa responden sebanyak 100 orang adalah yang berjenis kelamin Laki-laki yaitu sebanyak 64% selebihnya adalah responden Perempuan yaitu sebanyak 36%.

Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Data Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Frekuensi	Presentase (%)
1	SD	26	26
2	SMP	22	22
3	SMA	30	30
4	Diploma	2	2
5	Sarjana	20	20
Jumlah		100	100 %

Sumber : Data primer yang diolah, Tahun 2018

Diketahui bahwa responden terbanyak adalah responden dengan tingkat pendidikan SMA dengan responden sebanyak 30 orang, selanjutnya yaitu responden dengan tingkat pendidikan SD yaitu sebanyak 26 orang. Lalu yang ketiga tingkat pendidikan SMP dengan responden sebanyak 22 orang. Kemudian yang keempat dengan tingkat pendidikan Sarjana dengan responden sebanyak 20 orang. Dilanjutkan dengan responden paling sedikit dengan tingkat pendidikan Diploma dengan responden sebanyak 2 orang.

Identitas Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan

Identitas Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan

No	Jenis Pekerjaan	Frekuensi	Presentase (%)
1	PNS	6	6
2	Wirausaha	64	64
3	Buruh	4	4
4	Petani	26	26
Jumlah		100	100 %

Sumber : Data primer yang diolah, Tahun 2018

Dari data atau status pekerjaan diatas sebagaimana tertera dalam tabel 3.3, diketahui bahwa responden terbanyak yaitu jenis pekerjaan Wirausaha dengan responden sebanyak 64%. Berikutnya yaitu jenis pekerjaan petani dengan responden sebanyak 26%. Berikutnya yaitu jenis pekerjaan PNS dengan responden sebanyak 6%. Dan yang terakhir adalah jenis pekerjaan Buruh dengan responden sebanyak 4%.

Kriteria Penilaian

Kriteria Penelitian

No.	Indikator	Jumlah Skor
1	Pengetahuan tentang Electronic Government	354
2	Kemudahan dalam mengakses website	378
3	Keefisienan penggunaan Website untuk Electronic Government	372
4	Kemudahan Penggunaan Website	377
5	Respon Website	388
6	Kemudahan Menemukan Informasi	389
7	Ketersediaan Informasi yang Dibutuhkan	397
8	Pelayanan website Dinas PMPTSP	401
9	Kemudahan Menemukan Informasi di Website	415
10	Kemudahan Desain Website	481
11	Pengaruh Desain dalam Kecepatan Mengakses Informasi Pelayanan	398
12	Pengaruh Desain Website dalam Mencari Informasi Pelayanan Perizinan	404
13	Keterkaitan Desain Website dengan Pelayanan Perizinan	405
14	Bagaimana Desain Website Dinas PMPTSP Kab. Pematang	388
15	Respon DPMPTSP setelah Menggunakan Website	392
16	Bagaimana Pelayanan Setelah Menggunakan Website (E-Government)	386
17	Website Untuk Mempermudah Pelayanan	
18	Kapasitas Muatan Informasi Website DPMPTSP	393 424
19	Konten Website DPMPTSP	
20	Keterkaitan dengan Sumber Lain didalam Website	405 414
21	Kemudahan Masyarakat dalam Mengakses Website	404
22	Kerelevanan Konten Website dengan Pelayanan yang Diberikan	413
23	Apakah Website bisa Diakses oleh Orang Tua	
24	Apakah Website Bisa Diakses oleh Orang Muda	401 429
25	Apakah Website bisa Diakses oleh Kaum Disabilitas	434
26	Apakah Website bisa Diakses Dimana Saja dan Kapan Saja	434
	JUMLAH	10.476 : 26 = 403

Sumber : Data primer yang diolah, Tahun 2018

Berdasarkan jumlah keseluruhan dari penelitian indikator penilaian tentang Electronic Government pada pemerintah daerah dapat disimpulkan yaitu bahwa penerapan Electronic Governmnet di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang menurut pendapat masyarakat adalah Baik.

Hasil Penelitian

Hasil Penelitian

No	Indikator	Nilai	Kategori
1	Ketergunaan Website tentang <i>Electronic Government</i>	373	Baik
2	Sistem Navigasi Website	400	Baik
3	Desain Visual	415	Baik
4	Respon Dinas	390	Baik
5	Konten Website	412	Baik
6	Aksesibilitas	424	Sangat Baik

Sumber : Data primer yang diolah, Tahun 2018

Berdasarkan pada tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai tertinggi terdapat pada indikator “Aksesibilitas” dengan nilai 424. Dalam penggunaan website Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang indikator aksesibilitas mempunyai nilai yang tinggi karena dalam prakteknya website Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang memang mudah untuk diakses oleh siapa saja termasuk orang tua dan kaum difabilitas. Hal ini memberikan nilai tambah yang baik karena akses yang mudah dapat menarik masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang dan juga untuk mempermudah melakukan pelayanan perizinan.

Sedangkan nilai terendah dari indikator “Ketergunaan Website tentang Electronic Government” dengan nilai 373. Dalam ketergunaan website di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang masih terbilang kurang. Dikarenakan masyarakat Kabupaten Pemalang masih minim wawasan tentang pelayanan *Electronic Government*.

PENUTUP

Simpulan

1. Penerapan Electronic Government di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang memegang peranan yang penting untuk masyarakat yang akan mengurus perizinan melalui internet atau secara online di komputer atau ponsel. Dengan teknologi yang semakin maju, layanan pemerintah untuk masyarakat juga harus mengikuti perkembangan zaman yang sedang ada. Cara-cara lama seperti zaman dahulu untuk mendapatkan pelayanan tentunya akan menghambat proses pelayanan untuk masyarakat dan membutuhkan waktu yang lebih lama. Hal ini harus mulai ditinggalkan dan diganti dengan sesuatu seperti sekarang ini yang semuanya serba berbasis internet. Karena melihat semua orang saat ini sangat mudah untuk mengakses internet dan mencari informasi di dalamnya. Maka dari itu penerapan Electronic Government di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sangat membantu untuk pelayanan perizinan masyarakat Kabupaten Pemalang yang akan mengurus perizinan yang dibutuhkan.

2. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang di bab III mengenai penerapan *Electronic Government* melalui Website Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang dapat disimpulkan beberapa hal yang diharapkan dapat menjadi sebuah informasi yang berarti untuk dapat meningkatkan penggunaan website Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang agar pelayanan perizinan jadi lebih efektif dan efisien. Pada hasil penelitian dapat dilihat bagaimana penerapan *Electronic Government* melalui website Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang, yaitu ketergunaan website untuk menunjang kemudahan pelayanan, sistem navigasi website, desain visual, respon dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, konten website dan aksesibilitas dengan perincian sebagai berikut :

a. Ketergunaan *Electronic Government* untuk menunjang kemudahan pelayanan termasuk dalam kategori Baik dengan skor 373.

b. Sistem navigasi website termasuk dalam kategori Baik dengan skor 400.

c. Desain visual website termasuk dalam kategori Baik dengan skor 415.

d. Respon dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang termasuk dalam kategori Baik dengan skor 390.

e. Konten website Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang termasuk dalam kategori Baik dengan skor 412.

f. Aksesibilitas website Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang termasuk dalam kategori Sangat baik dengan skor 424.

3. Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang dengan melihat indikator ketergunaan *Electronic Government* untuk kemudahan pelayanan perizinan dengan kategori Baik, maka hal ini dapat membuktikan bahwa dengan adanya *Electronic Government* melalui website di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang dapat memudahkan masyarakat yang khususnya membutuhkan pelayanan perizinan untuk usaha mereka dan lain sebagainya.

4. Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang dengan melihat keseluruhan indikator yang peneliti gunakan dalam penelitian ini mendapatkan nilai 402 termasuk dalam kategori baik. Hal ini dapat disimpulkan bahwa masyarakat yang mengurus pelayanan perizinan menggunakan *Electronic Government* merasa puas dalam mendapatkan informasi melalui website Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang.

5. Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang, peneliti mendapatkan temuan baru dalam penggunaan website Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang bahwa masih banyak masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan perizinan belum mengerti informasi mengenai *Electronic Government*. Jadi masih banyak masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan perizinan dengan mendatangi Dinas secara langsung, yang seharusnya bisa dilakukan dimana saja dan kapan saja dan datang ke Dinas hanya untuk pengambilan izin yang sudah jadi. Hal ini hanya menjadi penghambat untuk pelayanan perizinan yang cepat, efektif dan efisien karena masyarakat harus menunggu giliran untuk mendapatkan pelayanan perizinan secara manual yang seharusnya bisa di minimalisir dengan adanya *Electronic Government*.

Saran

1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang harus terus mengoptimalkan penggunaan Electronic Government untuk kemudahan pelayanan perizinan masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan perizinan, karena dengan adanya Electronic Government, pelayanan perizinan menjadi lebih mudah dan bisa diakses kapan saja dimana saja dan semua kalangan pun bisa mengaksesnya jadi keterbukaan informasi menjadi seluas-luasnya untuk masyarakat yang membutuhkan.
2. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Pemalang melakukan sosialisasi ke setiap kalangan masyarakat di Kabupaten Pemalang mengenai adanya *Electronic Government* untuk mempermudah pelayanan perizinan yang bisa diakses kapan saja dan dimana saja.

DAFTAR PUSTAKA

Referensi buku :

- Abadi, T.W., Ainur R., dan Arsiyah. 2010. *Informasi Publik Berbasis EGovernment*. Sidoarjo: Umsida Press
- Arief Sosiawan, Edwi. Tanpa Tahun. *Evaluasi Implementasi E-Government Pada Situs Web Pemerintah Daerah Di Indonesia : Prespektif Content Dan Manajemen*, Yogyakarta: Universitas Veteran.
- Basuki, Sulistiyo. 2006. *Metode Penelitian*. Jakarta: Wadatama Widya Sastra UI
- Budiman Rusli. 2004, *Pelayanan Publik di Era Reformasi*: Jakarta: Rineka Cipta
- Darsono. 2010. *Budaya Organisasi: Kajian Tentang Organisasi, Budaya*, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang, 2013, *Pedoman Umum Ketentuan Waktu Persyaratan dan Retribusi Perizinan*, Pemalang: BPM dan PP Kabupaten Pemalang
- Dunn, N. William, 1998. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Jakarta: Gadjah Mada University Press
- Dwiyanto, Agus.2006. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Ekonomi, Sosial, dan Politik*. Jakarta: Nusantara Consulting
- Hendrayudi, Syah LY, Akbar M. 2011. *Evaluasi Website Pemerintah Daerah Berdasar Layanan Antar Lembaga Pemerintah, Pemerintah kepada Dunia Usaha dan Pemerintah kepada Warga Negara*. <http://blog.binadarma.ac.id/akbar/?cat>
- Indrajit, R.E., Dudy R., dan Akbar Z. 2005. *E-Government in Action*. Yogyakarta: Lijian Poltak Sinambela.2006. *Reformasi Pelayanan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara
- Penerbit Andi. Hal: 27-28
- Ratminto dan Winarsih, 2006, *Manajemen Pelayanan*, Yogyakarta :Pustaka Pelajar.
- Sedarmayanti. 2004. *Good Governance (Kepemerintahan yang Baik)*. Bagian Kedua. Bandung. CV Mandar Maju
- Siregar, Sofyan. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif: Dilengkapi dengan perbandingan perhitungan manual dan SPSS*. Jakarta: Kencana
- Sugiyono.2008. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta

United Nations Development Program (UNDP). 1997. Governance For Sustainable Human Development

Vivian, John. 2008. *Teori Komunikasi Massa*. Jakarta: Kencana Prenada Media.

Jurnal

Nova Yohana, Tantri Puspita, Welly Wirman. (2012). Pengelolaan Website Sebagai E-Government Oleh Pemerintah Kota Pekanbaru Dalam Penyampaian Informasi Bagi Masyarakat

Sulistiyo, Dana, Herlan Puspa Negara, & Yanuar Firdaus. (2008). Analisis Kajian Standarisasi Isi Situs Web Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. ISSN: 1979-2328

Perundang-Undangan

Peraturan Bupati Pematang No. 56 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pematang

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah